

**PERAN PEREMPUAN DALAM RUANG PUBLIK
PERSPEKTIF MUI DAN WALUBI PROVINSI LAMPUNG**

Skripsi

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Dalam Ilmu Ushuludin dan Studi Agama

Oleh:

**KHUSNUL KHOTIMAH
1831020149**

Program Studi : Studi Agama-Agama



**FAKULTAS USHULUDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M**

**PERAN PEREMPUAN DALAM RUANG PUBLIK
PERSPEKTIF MUI DAN WALUBI PROVINSI LAMPUNG**

Skripsi

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-
syarat

Guna memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Dalam Ilmu Ushuludin dan Studi Agama

Oleh:

KHUSNUL KHOTIMAH

1831020149

Program Studi : Studi Agama-Agama

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Idrus Ruslan, M.Ag
Pembimbing II : Dr. Kiki Muhammad Hakiki, M.A



**FAKULTAS USHULUDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG 1444/2023**

ABSTRAK

Peran wanita sangatlah menjadi sorotan dalam kehidupan masyarakat, sehingga terdapat pro dan kontra dalam memahami kedudukannya. Setiap agama memiliki keyakinan dan ajaran agamanya masing-masing yaitu kitab suci sebagai pedoman hidup umat manusia yang wajib dipelajari, pahami, dan di amalkan setiap ajarannya. Berdasarkan dalam pemaparan diatas, maka peneliti mengangkat sebuah judul peran perempuan dalam ruang publik perspektif Mui dan Walubi Provinsi Lampung. Dengan merumuskan masalah penelitian yaitu, Bagaimana pandangan mui tentang perempuan dalam ruang publik? Bagaimana pandangan walubi tentang peran perempuan dalam ruang publik? Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan mui dan walubi mengenai peran perempuan dalam ruang publik?

Penelitian ini bila dilihat dari jenisnya termasuk pendekatan kualitatif, sedangkan sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengambilannya purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dalam proses analisa peneliti menggunakan metode komperatif, yaitu metode yang digunakan dengan cara membandingkan pendapat atau data yang satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran perempuan di ruang publik perspektif mui dan walubi Provinsi Lampung adalah Sebagaimana memandang urusan publik adalah urusan bersama, baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki tidak sekedar berjalan di sektor publik dan perempuan berjalan di sektor domestik. Keduanya memiliki peran yang sama. Dengan demikian penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Mui dan Walubi memiliki sudut pandang yang positif terhadap peranan perempuan dalam ruang publik.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khusnul Khotimah
NPM : 1831020149
Jurusan/Prodi : Studi Agama-Agama
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Peran Perempuan Dalam Ruang Publik Perspektif Mui Dan Walubi Provinsi Lampung” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Januari 2024



Penulis,

KhusnulKhotimah
NPM. 1831020149



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG

Alamat: Jl. Lekoh H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35151 Telp. (071) 703260

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi: Peran Perempuan Dalam Ruang Publik Perspektif
Mufi Dan Wahabi Provinsi Lampung
Nama: Khusnul Khotimah
NPM: 1831020149
Jurusan: Studi Agama-Agama
Fakultas: Ushuluddin dan Studi Agama

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Idrus Ruslan, M.A.
NIP. 197101061997031003


Dr. Kiki Muhammad Hakiki, M.A.
NIP. 19802172009121001

Mengetahui,
Ketua Jurusan


Ahmad Muftagin, M.A.
NIP. 19750605200003100



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG**

Aidmat: Jl. Leikol, H. Endro Suratmaja Sukarame Banjar Lampung 35151 Telp. (072) 903260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Peran Perempuan Dalam Ruang Publik Perspektif Mui Dan Walubi Provinsi Lampung"** disusun oleh **Khusnul Khotimah, NPM: 1831020149** jurusan **Studi Agama Agama**, Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas **Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung** pada **Hari Kamis, 11 Januari 2024.**

TIM PENGUJI

Ketua Sidang

Ahmad Mutaqin, M.Ag

Sekretaris Sidang

Erwanto, M.Psi., Psi, Psikolog

Penguji Utama

Dr. Muslimin, MA

Penguji Pendamping I

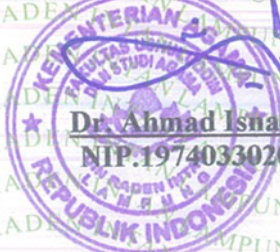
Dr. Idrus Ruslan, M.Ag

Penguji Pendamping II

Dr. Kiki Muhammad Hakiki, M.A

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama



Dr. Ahmad Isaeni, M.A

NIP.1974033020031001

MOTTO

“Pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.”

- Ahmad Al Shugairi

PERSEMBAHAN

Teriring do'a dan rasa syukur kepada Allah SWT, atas segala nikmat, berkah kemudahan, kelancaran dan pertolongan dalam menjali kehidupan yang fana ini. Serta rasa sayung dan perlindungan-Nya yang selalu mengiri langkah kaki ini. Maka dengan ketulusan hati, kupersembahkan karya sederhanaaku ini kepada:

1. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rabb-ku Allah SWT. Penata hidupku atas sebuah scenario yang telah di buat untuk hidup dan kelangsungan pendidikan ku hingga aku dapat menimba ilmusejauh ini, dan kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Yang selalu kita nantikan syafa'atnya di Yaumul Khirnanti.
2. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Sutimin dan Ibu Supinatun yang telah membesarkanku, medidikku, dan memberikan kasih sayung tanpa syarat kepadaku. Senantiasa memfasilitasiku, mendukung segala pilihanku dan mendo'akan keberhasilanku disetiap shalat hingga bisa menghantarkanku menyelesaikan pendidikanku di UIN Raden Intan Lampung ini. Jasa, kasih sayung dan ketulusan kalian tidak akan pernah terbalas olehku. Melalui karya sederhanaaku ini, semoga dapat memberikan rasa bangga dan senyum bahagia untuk kalian.
3. Ucapan terimakasih untuk kedua pembimbing skripsi Bapak Prof. Dr. H. Idrus Ruslan, M.Ag dan Bapak Dr. Kiki Muhammad Hakiki, M.A yang telah dengan sabar dan banyak memberi kemudahan dan bimbingan dari awal pengerjaan pengajuan judul, pengajuan proposal, pengajuan seminar hingga selesainya skripsi ini. Selainitumereka juga yang memberikan kritik konstruktif bagi penelitian skripsi yang sederhana ini.
4. Suamiku Edho Diadhora dan anakku Kaka Rafisqy Diadhora yang selalu memberikan kalimat-kalimat semangat agar aku terus mencapai apa yang sedang ingin

- aku raih serta yang selalu ada ketika aku membutuhkan sebuah dorongan motivasi yang membuatku terus bangkit.
5. Untuk adikku tersayang satu-satunya Alicia Sifatul Khoirunnisa terima kasih atas segala dukungan dan do'a untuk membantu kelancaran dalam pengerjaan skripsiku ini.
 6. Untuk Bapak Asep dan Ibu Etik selaku mertuaku yang sudah kuanggap seperti Bapak dan Ibuku sendiri beserta keluarga besar yang telah member dukungan, semangat dan do'anya untuk kelancaran skripsiku.
 7. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang aku cintai dan aku banggakan.

Sangat penting bagiku untuk menuliskan nama-nama mereka yang begitu luar biasa dan banyak memberikan arti dalam kehidupanku saat ini, sehingga dalam segala keterbatasanku dalam mengingat, kuhaturkan beribu-ribu terimakasih dan maaf karena tidak dapat aku sebutkan satu-persatu. Hanyalah Allah yang dapat mencatat semua nama yang ikutan di dalam aktivitas kegiatan pendidikanku dan semoga Allah membalas semua kebaikan yang telah mereka berikan untukku. Diakhir persembahanku ini kuingin mengatakan kepada setiap orang yang aku temui dalam kehidupanku yang telah memberikan jasa-jasanya kepadaku semoga Allah selalu membalas kebaikan kalian dengan kebaikan pula aamiin.

Bandar Lampung, Januari 2024

Penulis

KhusnulKhotimah

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Khusnul khotimah dilahirkan di Desa Sidorahayu pada tanggal 12 September 1999. Bertempat tinggal di Desa Sidorahayu Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Sutimin dan Ibu Supinatun. Penulis memiliki adik perempuan satu-satunya yang bernama Alicia Sifatul Khairunnisa.

Penulis menamatkan jenjang pendidikan Sekolah Dasar di SDN 01 Sidorahayu pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 02 abung semuli pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 02 Abung Semuli pada tahun 2018, kemudian melanjutkan pendidikan S1 di UIN Raden Intan Lampung Fakultas Ushuludin dan Studi Agama Jurusan Studi Agama-Agama hingga sekarang. Penulis mengikuti KKN-DR (Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah) di Desa Bumi Restu Kecamatan Abung Surakarta dan melaksanakan PKL di Desa Sidorahayu Abung Semuli.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul “PERAN PEREMPUAN DALAM RUANG PUBLIK PERSPEKTIF MUI DAN WALUBI”. Shalawat dan salam tak lupa disanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang menderang ini dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul kiamat, Aamiin Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam program studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama. Dalam proses pembuatan tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi dan tentunya skripsi ini tidak luput dari kesalahan serta keterbatasan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, peneliti mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang sudah membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, terima kasih peneliti ucapkan kepada:

- 1) Bapak Prof. Wan Jamaluddin, Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
- 2) Bapak Dr. Ahmad Isnaeni M.A selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama
- 3) Bapak Ahmad Muttaqin, M.Ag selaku ketua prodi Studi Agama-Agama
- 4) Bapak prof. Dr. H. Idrus Ruslan, M. Ag dan Bapak Dr. Kiki Muhammad hakiki, M.A selaku pembimbing I dan II yang sudah dengan sabar memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan hingga penulisan skripsi ini selesai, semoga barokah ilmu dan pengetahuan yang diberikan selama ini
- 5) Bapak Andi Lee Wirawan selaku ketua Walubi prov. Lampung dan Ibu Hayesti sekretaris komisi perempuan, remaja dan keluarga MUI prov lampung
- 6) Kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan

- 7) Kepada seluruh staf akademik dan pegawai perpustakaan yang memberikan pelayanan yang baik dalam mendapatkan informasi, sumber referensi data, dan lain-lain
- 8) Pimpinan Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan Pimpinan Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama beserta jajaran karyawan yang telah memperkenankan peneliti untuk meminjam literatur untuk kebutuhan penelitian
- 9) Kepada rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Studi Agama-Agama angkatan 2018 yang telah bersama-sama mengukir sejarah, kenangan dan pengalaman hingga saat ini serta motivasi selama penulisan skripsi ini
- 10) Seluruh sahabat dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan dukungan, motivasi, inspirasi dan membantu dalam proses penulisan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan, waktu dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya kepada pembaca dapat memberikan masukan, saran, dan kritik guna melengkapi tulisan ini demi perbaikan selanjutnya. Semoga Allah SWT menjadikannya sebagai amal ibadah dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua, aamiin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan judul	1
B. Latar belakang masalah	2
C. Fokus dan sub fokus penelitian	8
D. Rumusan masalah	8
E. Tujuan penelitian	8
F. Manfaat penelitian	9
G. Kajian penelitian terdahulu yang relevan	9
H. Metode penelitian	12
I. Sistematika pembahasan	19
BAB II PERAN PEREMPUAN DAN RUANG PUBLIK	
A. Peran Perempuan	21
a. Pengertian Peran Perempuan	21
b. Kedudukan Perempuan	22
c. Peran Perempuan dalam sosial	24
B. Ruang Publik	30
a. Pengertian Ruang Publik	30

- b. Bentuk-Bentuk Ruang Publik 31
- c. Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Ruang Publik.....33

BAB III PANDANGAN MUI DAN WALUBI TENTANG KEDUDUKAN PEREMPUAN

- A. MUI Provinsi Lampung 40
 - a. Sejarah MUI..... 40
 - b. Visi dan Misi MUI Provinsi Lampung 43
 - c. Program Kemitraan MUI Provinsi Lampung 45
 - d. Kedudukan Peran Perempuan dalam Perspektif MUI Provinsi Lampung 50
- B. WALUBI Provinsi Lampung..... 51
 - a. Sejarah WALUBI 51
 - b. Visi dan Misi WALUBI..... 52
 - c. Program Kemitraan WALUBI Provinsi Lampung 53
 - d. Kedudukan Peran Perempuan dalam Perspektif WALUBI Provinsi Lampung 54

BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN

- A. Pandangan MUI Tentang Peran Perempuan dalam Ruang Publik 58
- B. Pandangan WALUBI Tentang Peran Perempuan dalam Ruang Publik 62
- C. Persamaan dan Perbedaan MUI dan WALUBI Tentang Peran Perempuan dalam Ruang Publik .. 75

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 79
- B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan untuk menghindari kesalah pahaman, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah “Peran Perempuan Dalam Ruang Publik (Perspektif MUI dan WALUBI)”. Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal ini yaitu, sebagai berikut:

Peran ialah perangkat tingkat yang diharapkan dan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Sedangkan perempuan adalah wanita dewasa. Jadi peran perempuan memiliki pengertian sesuatu perangkat tingkat yang diharapkan dan dimiliki oleh perempuan dewasa yang memiliki kedudukan dalam masyarakat.

Pengertian selanjutnya yaitu Ruang publik, yang terdiri dari dua pengertian : pertama, istilah ini mengacu pada suatu ruang yang dapat diakses semua orang, maka juga membatasi dirinya secara special dari adanya ruang lain yaitu, ruang privat. Kedua, istilah ruang publik memiliki arti normatif, yakni mengacu pada peranan masyarakat warga dalam demokrasi. Ruang publik dalam arti normatif yang memiliki pengertian suatu ruang komunikasi para warganegara untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan¹.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perspektif adalah sudut pandang atau pandangan. Kata perspektif itu sendiri mengandung makna, pendapat salah satu orang atau kelompok

¹ F. Budi Hardiman , *Ruang Publik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), 10.

tentang arti suatu peristiwa, baik untuk keadaan sesaat maupun untuk masa yang akan datang².

MUI (Majelis Ulama Indonesia) adalah organisasi berazaskan Islam, wadah utama Majelis menghimpun para ulama, kaum cendekiawan Muslim Indonesia koordinasi gerak, langkah-langkah kegiatan umat Islam Indonesia³. Jadi MUI adalah salah satu institusi ulama yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap keberadaan Islam di Indonesia.

WALUBI adalah perwakilan umat Buddha Indonesia yang terdiri dari Majelis-Majelis Agama Buddha, lembaga keagamaan Buddha, Vidyaka Sabha, Dewan Penyantunan dan wadah kemasyarakatan yang bernapaskan Agama Buddha⁴.

Berdasarkan penegasan-penegasan istilah di atas, maka yang dimaksud dengan judul proposal ini adalah suatu upaya untuk menggali lebih dalam lagi suatu kajian yang meneliti tentang peran perempuan dalam ruang publik dari pandangan MUI dan WALUBI sesuai dengan ajaran dan aturan agamanya.

B. Latar Belakang Masalah

Sebagai masyarakat masih ada saja yang berasumsi bahwa wanita tiada lain hanyalah sesosok insan lemah yang selalu taat terhadap suami, baik dalam hal yang buruk maupun yang baik, sehingga wanita tidak boleh keluar dari rumah untuk keperluan apa pun. Mereka hanya boleh bergerak dalam rumah, seperti yang sering mereka lakukan adalah beraktifitas di kasur, dapur dan sumur. Tak jarang para suami menganggap bahwa kaum wanita hanyalah pelayan, tempat melampiaskan nafsu, dan sebagai seorang perawat. Para kaum laki-laki terkadang melupakan martabat seorang wanita yang seharusnya juga memiliki hak yang sama, seperti

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 590.

³ Ahmad Insa Ansori, *Kedudukan Fatma Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Hukum Islam*, Jurnal Mahkamah Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam, vol. 5, No. 1, (2020).

⁴ Ismail Sholeh, *Pandangan Walubi Terhadap Konflik Rohingnya di Myanmar*, diakses pada 22 Januari 2022 dari <https://repository.uinjkt.ac.id>

mendapatkan pendidikan, inspirasi yang didengar dan berkecimpung pula dalam dunia publik⁵.

Seperti kesetaraan sosial. Seiring berkembangnya zaman dan tuntutan sosial, perempuan ternyata lebih memiliki ruang dan tempat, tidak hanya terbatas dalam lingkup domestic saja, namun mencakup ranah sosial. Dalam ikatan rumah tangga laki-laki memang harus jadi pemimpin, namun untuk konteks sosial semua pihak boleh mengambil peran tidak dibatasi. Fenomena yang sangat umum jika kita lihat pada situasi hari ini, perempuan bekerja, bersekolah dan beraktivitas di luar rumah. Keterampilan yang dimiliki oleh perempuan karena menjalankan kerja-kerja domestic pun menjadikan tenaga kerja unggulan dan di cari oleh industri. Sebagai contoh, dalam perkembangan industri garmen di wilayah jawa tengah menyebutkan bahwa 85% peluang kerja di dominasi oleh perempuan.

Proses perempuan untuk melangkah keluar dari peran domestic seputar dapur, kasur dan sumur ini memunculkan kesadaran baru sebagai perempuan berdaya namun disisi lain juga memunculkan problem baru. Problem yang sering mengemuka adalah seperti adanya beban ganda bagi perempuan yang bekerja di luar atau di rumah (pekerja rumahan), mereka bertugas di ranah public namun tetap memiliki tanggung jawab domestic, berbeda dengan laki-laki ketika sudah masuk ranah public maka kebanyakan mereka lepas tanggung jawab untuk urusan domestic⁶. Problem lain yang tidak kalah penting adalah keberadaan perempuan diranah public juga memunculkan polemic di masyarakat. Sebagian orang masih memandang bahwa menjadi suatu ketidaktantasan jika perempuan berperan di public karena fitrah perempuan harusnya berada dirumah. Masyarakat pada

⁵ Marantika, Skripsi : “*Peran Wanita Dalam Ruang Publik Perspektif Islam dan Kristen*” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017), 4

⁶ Anriana Venny, “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat yang Jadi Persoalan Publik*”, dalam <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/647-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt-persoalan-privat-yang-jadi-persoalan-publik.html>. di akses pada tanggal 29 maret 2022.

umumnya sudah terdistorsi dengan pemahaman bahwa laki-laki bertugas diluar sementara perempuan bertugas didalam rumah.

Problematika itu pun tak berhenti sebatas pengamatan secara sosial namun juga secara kelembagaan yang turut meyoroti problematika mengenai peran wanita dalam ruang public diranah kesetaraan sosial, seperti MUI dan WALUBI. Pernyataan di atas selaras dengan hasil wawancara awal yang telah dilakukan peneliti terhadap narasumber, pada tanggal 12 juni 2023. Wawancara ini dilakukan guna memperoleh informasi mengenai peran perempuan dalam ruang public, perspektif MUI dan WALUBI.

Ibu Hayesti Maulida salah satu seketaris MUI berpendapat bahwa perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut,serta pekerjaan tersebut dilakukan dengan suasana terhormat, sopan serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. Namun realitasnya, umumnya kehidupan perempuan di indonesia ini, ke mitra sejajaran antara suami dan istri belum sepenuhnya terwujud. Hal ini tidak lain di sebabkan masih adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan ke mitra sejajaran.⁷ Perbincangan mengenai perempuan ini yang mengharuskan kita melihat dua sudut pandang yang berbeda. Pertama, sudut cita ideal perempuan muslimah seperti yang di ajarkan atau dijelaskan dalam al-qur'an dan al-sunah, kedua sudut realita atau kenyataan perempuan muslimah secara objektif dalam realitas masyarakat (sejarah), persoalan sesungguhnya timbul manakala ada kesenjangan (disparitas) antara cita-idealitas dengan fakta-fakta perempuan dalam dimensi ruang dan waktu. Hal tersebut sesuai dengan ungkapan Abd Muin Salim tentang mengimplementasikan tujuan hidup manusia, yaitu

⁷Hayesti Maulida, "Perempuan Mempunyai Hak Untuk Bekerja".
Wawancara 14 Agustus 2023. Pukul 09.00 WIB.

pertama agar manusia mewujudkan kehidupan yang selaras dengan fitrahnya (*al-cald*), kedua memelihara dan memenuhi hak-hak kemasyarakatan dan pribadi yang dilindungi (*al-qist*), ketiga pada saat yang sama manusia memelihara diri atau membebaskan diri dari kekejian (*al-fahishah*), dan kemungkaran (*al-munkar*), dan kesewenanganwenangan (*al-baghi*)⁸. Jika kita menarik kembali kepada sejarah zaman Nabi, para sahabat-sahabat perempuan sebenarnya sudah banyak melibatkan diri dan ikutserta dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Sebut saja Ruba'ī binti Mu'awwidz yang pernah berkata bahwa beliau ikut bertugas memberi minum pasukan perang, melayani mereka serta memulangkan orang-orang yang terbunuh dan terluka di madinah.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Andi Lie ketua WALUBI berpendapat bahwa wanita mempunyai potensi yang sama dengan kaum laki-laki dengan mencapai kekuatan spritual, sehingga Buddha adalah guru agama pertama yang memberikan kesempatan yang sama dengan kaum wanita. Dalam Samyutta Nikaya, sang Buddha mengatakan bahwa dalam beberapa hal perempuan dianggap lebih cerdas dan bijaksana dari pada laki-laki. Perempuan dapat mencapai tingkat kesucian seperti laki-laki, dengan cara menjalankan ajaran sang Buddha dengan baik⁹. Sikap Buddha yang adil terhadap gender ini adalah didirikan Sabgha Bhikkhuni atau komunitas perempuan yang menjalani hidup suci sehingga perempuan memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan atas jalan hidupnya sendiri baik menjadi ibu rumah tangga biasa atau bahkan lebih seperti seorang pemimpin negara atau pemimpin agama. Buddha memberikan pengajaran yang sama kepada para muridnya, baik laki-laki maupun perempuan.

Pada saat ini banyak ditemukan perempuan-perempuan yang menjadi pemimpin. Baik itu pemimpin dalam sebuah negara, maupun pemimpin dalam hal

⁸ Marantika, "Peran Perempuan Dalam Ruang Publik Perspektif Islam dan Kristen" (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2017), 7-8

⁹ Andi Lie, "Wanita mempunyai potensi yang sama dengan laki-laki" Wawancara juni 27, 2023. Pukul 12.40 WIB.

peribadatan. Contohnya Maha Prajapati Gotami yang memimpin Sangha semasa hidup Sang Buddha, atau pada masa sekarang ini, Aung San Suu Kyi yang berasal dari Myanmar dan beragama Buddha merupakan salah satu perempuan yang aktif dalam bidang negara dan politik sehingga Aung San Suu Kyi mendapatkan penghargaan Nobel Perdamaian atas perjuangannya dalam memajukan demokrasi di negaranya. Sebelum Buddha Gautama hadir, diskriminasi terhadap kaum perempuan merupakan hal yang umum dalam masyarakat India kuno masa itu. Mereka tidak dianggap sebagai individu dengan hak-haknya, mereka hanya merupakan milik yang dapat diberikan, dijual bahkan ditukarkan. Mereka dianggap sebagai “benda” pelengkap bagi laki-laki. Tugas mereka hanyalah melaksanakan pekerjaan rumah tangga, memuaskan nafsu laki-laki dan sebagai mesin untuk memperbanyak keturunan. Perempuan pada zaman Brahmanisme masa itu di bawah kekuasaan kaum laki-laki, pada masa kanak-kanak perempuan di bawah kekuasaan ayahnya. Setelah menikah perempuan di bawah kekuasaan suaminya, meskipun suaminya orang jahat, jika suaminya meninggal dunia, kekuasaan beralih kepada anak laki-laki.

Kedudukan laki-laki masa itu dipandang sangat tinggi karena selain sebagai penerus garis keturunan hanya laki-lakilah yang boleh mengadakan upacara sembahyang kepada orang tua dan leluhur yang telah meninggal dunia, hingga sekte Brahmanisme berpendapat bahwa yang boleh menjadi pemimpin upacara hanya kalangan laki-laki¹⁰. Sang Buddha sendiri berpandangan bahwa laki-laki dan perempuan sama saja, tidak ada sistem kasta, orang yang mulia ialah orang yang mampu menjalankan Dhamma terlepas itu laki-laki atau perempuan. Salah satu ini juga yang membuat sang Buddha terkadang menegur golongan Brahmana. Mereka mengajarkan ajaran mereka demi mengkokohkan kedudukan mereka di mata masyarakat sehingga hal ini harus dijauhi oleh sang Buddha. Pada zaman kasta Brahmana, kaum Sudra

¹⁰*Ibid*, 54

dan budak perempuan juga dilarang membaca Weda karena seorang perempuan menanggung beban seperti haid, hamil dan melahirkan dan itu yang menghambat kaum perempuan mencapai kedudukan suci.

Ajaran Buddha tidak membenarkan untuk memandang perempuan lebih rendah. Perempuan memiliki kemampuan dan bisa melebihi laki-laki, apabila mereka mampu menjalani ajaran dan peraturan yang dipimpin oleh sang Buddha yang mana dapat mencapai tingkat kesucian sotapanna, sakadagami, anagami, arahat⁶ dan sang Buddha menjawab bahwa mereka mampu untuk mencapai tingkat-tingkat kesucian. Buddha memberi perempuan bebas dari deskriminasi. Dengan demikian, sang Buddha hadir membawa pembaharuan. Kasta dihapuskan, perempuan diberikan hak dan kesempatan yang hampir sama dengan laki dalam menjalani kehidupan yang religius maupun sosial¹¹.

Sehingga penulis tertarik untuk menggali informasi mengenai pandangan MUI dan WALUBI terhadap peran perempuan dan bagaimana persamaan dan perbedaan MUI dan WALUBI tentang pandangannya mengenai peran perempuan dalam ruang publik. Dengan begitu penulis penulis tertarik untuk meneliti hal-hal tersebut, dengan penelitian yang berjudul Peran Perempuan dalam Ruang Publik Perspektif MUI dan WALUBI.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus

Dalam penelitian ini penulis memilih point, peran perempuan dalam ruang publik sebagai fokus penelitian dalam menyelesaikan karya ilmiah ini yang berjudul “peran perempuan dalam ruang publik perspektif MUI dan WALUBI provinsi Lampung”.

2. Sub Fokus

¹¹ Mulyani Sofiana:”*peran perempuan dalam agama buddha*”, (Skripsi, UIN Ar-Raniry, Darussallam Banda Aceh, 2019), 6-7.

- a. Memberikan pemahaman mengenai peran perempuan dalam ruang publik dalam pandangan MUI dan WALUBI.
- b. Memahami makna dan peran perempuan dalam ruang publik dalam perspektif MUI dan WALUBI.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan MUI tentang peran perempuan dalam ruang publik?
2. Bagaimana pandangan WALUBI tentang peran perempuan dalam ruang publik ?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan MUI dan WALUBI mengenai peran perempuan dalam ruang publik ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami pandangan MUI tentang peran perempuan dalam ruang publik.
2. Untuk mengetahui dan memahami pandangan WALUBI tentang peran perempuan dalam ruang publik.
3. Untuk mengetahui dan memahami persamaan dan perbedaan mengenai pandangan MUI dan WALUBI tentang peran perempuan dalam ruang publik.

F. Manfaat Penelitian

a. Segi Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini akan memberi informasi serta menambah wawasan bagi pembaca atau masyarakat umum tentang peran perempuan dalam ruang publik perspektif MUI dan WALUBI. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup signifikan sebagai masukan pengetahuan atau literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian bagi para insan akademik yang sedang mempelajarinya.

b. Segi Praktis

1. Menambah khasanah keilmuan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama khususnya Prodi Studi Agama-Agama.
2. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi peneliti berikutnya untuk meneliti masalah-masalah yang berkaitan dengan perempuan dalam perspektik MUI dan WALUBI.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama dari seseorang baik dalam bentuk buku, atau dalam bentuk tulisan yang lain. Maka peneliti akan memaparkan beberapa karya ilmiah yang menjelaskan tentang peran perempuan dalam ruang publik perspektif MUI dan WALUBI.

1. Skripsi yang berjudul “Wanita dan Ruang Publik”, di tulis oleh Sesilia C. Monalisa F. Gultom, program studi arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia Depok 2009. Penelitian tersebut membahas tentang rintangan-rintangan yang diharapkan oleh para wanita untuk beraktifitas dalam ruang publik dengan memperhatikan hubungan karakteristik gender dan arsitektur. Hal yang di amati adalah gender dalam kaitannya dengan budaya dan kepercayaan, karakteristik gender, keamanan, ruang personal, dan privasi. Berdasarkan penelitian di atas terdapat persamaan dan perbedaan dari hasil penelitiannya. Penelitian ini mempunyai kesamaan yakni sama-sama membahas wanita dan ruang publik, tetapi yang kemudian menjadi pembeda yakni rintangan-rintangan dalam ruang public dengan memperhatikan hubungan karakteristik gender yang berkaitan dengan budaya.
2. Skripsi yang berjudul “*Menjadi Orang Tua Berhati Buddha*”, di tulis oleh Claridge. Penelitian ini mengkaji tentang peran seorang perempuan yaitu ibu sangat menentukan sikap dari seseorang buddha, sebuah keluarga

adalah tempat dimana pikiran saling berhubungan yang mana orang tua memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan keluarga yang bahagia termasuk dalam pengasuh anak. Para orang tua di ajak untuk mengasuh anak mereka dengan menggunakan hati buddha mereka. Penelitian ini memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas peran perempuan dalam Buddha, namun terdapat perbedaan dalam penelitian ini, yaitu membahas fokus penelitian, pada penelitian ini fokus terhadap alasan memahami makna dan peran perempuan dalam ruang publik.

3. Skripsi yang berjudul “Wanita Karir dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pandangan K.H. Husein Muhammad)”, ditulis oleh Ziadatun Ni'mah, ilmu Hukum Islam, Fakultas Syariah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009, penelitian yang dilakukan Ziadatun Ni'mah menjelaskan tentang kajian wanita karir dalam perspektif hukum islam pandangan K.H. Husein Muhammad. Penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh Ziadatun Ni'mah sama-sama membahas wanita dalam perspektif hukum islam, namun yang membedakan fokus penelitiannya, sedangkan yang membedakan penelitian ini adalah Ziadatun Ni'mah membahas tentang kajian wanita karir dan penelitian ini membahas tentang peran perempuan dalam ruang publik.
4. Skripsi yang berjudul “Peran Wanita Dalam Ruang Publik: Perspektif Islam dan Kristen”, ditulis oleh Marantika, Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin, UIN Raden Intan Lampung 2017. Penelitian ini mengkaji tentang peran perempuan dalam ruang publik perspektif islam dan kristen. Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang ditulis Marantika sama-sama membahas peran wanita dalam ruang publik, tetapi yang menjadi pembeda yakni fokus penelitiannya dan pemahaman mengenai peran perempuan dalam ruang publik perspektif mui dan walubi.

5. Skripsi yang berjudul “Kontruksi Peran Perempuan dalam Publik Liputan Khas Sukses di Mata Kami pada Majalah Femina”, ditulis oleh latifah komunikasi dan penyiaran islam, fakultas ilmu dakwah dan komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2014. Fokus kajian skripsi ini membahas mengenai kontruksi peran sosial perempuan dalam publik liputan khas sukses di mata kami majalah femina. Berdasarkan penelitian di atas terdapat persamaan dan perbedaan dari hasil penelitiannya. Persamaannya adalah sama-sama membahas peran perempuan, dan perbedaannya adalah penelitian diatas membahas mengenai kontruksi sosial dalam liputan khas sukses dimata majalah femina, sedangkan penelitian ini hanya berfokus terhadap peran perempuan dalam perspektif Mui dan Walubi.

H. Metode Penelitian

Metode ilmiah pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, suatu penelitian berlangsung harus di tetapkan terlebih dahulu metode penelitian yang dipergunakan sehingga dalam penyelesaiannya dan pelaksanaannya penelitian dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang di harapkan. Pada bagian ini akan di jelaskan hal yang berkaitan dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Kualitatif adalah tipe metode analisis yang lebih menekankan pada isi (kualitas) dari data tersebut dan bukan pada angka. Data-data dan hasil analisis yang akan di sajikan dalam bentuk kata-kata, kalimat, atau gambar dan tidak mengarah pada angka. Adapun bila ada data yang tersaji dalam bentuk angka, hanyalah

sebagai pendukung dan tidak mempengaruhi analisis¹². Strauss dan Corbin mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang tata cara pelaksanaannya tidak menggunakan tata cara statistik atau perhitungan yang erat kaitannya dengan angka. Penelitian kualitatif lebih mengacu kepada kehidupan manusia, mengenai perilaku, kebudayaan, hubungan timbal balik, kehidupan dalam berorganisasi dan yang berkaitan dengan gerakan sosial masyarakat. Di lihat dari segi penyajian penelitian dan metode penelitiannya, maka peneliti ini termasuk kedalam penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, yakni dengan menganalisis data yang akurat dengan fakta-fakta objek penelitian dan di susun secara sistematis dalam bentuk naratif. Begitupun dengan penjelasan Ibnu Hajar, bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang hasilnya di sajikan dalam bentuk naratif¹³.

Penelitian ini dilihat dari tempatnya maka tergolong penelitian lapangan (*field research*). Dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini dilapangan kehidupan, dalam arti bukan di laboratorium atau perpustakaan. Karena ini data yang dianggap sebagai data primer adalah data yang di peroleh dari lapangan penelitian¹⁴. Dalam hal ini peneliti datang langsung ke lokasi penelitian yaitu di kantor Mui Provinsi Lampung kec. Rajabasa, dan Walubi di Vihara Amurwa Bhumi Graha kec. Telukbetung Selatan. Peneliti mengamati dan mempelajari secara langsung informasi mengenai peran perempuan dalam ruang publik dan akan

¹² Citra Ayu Pratiwi, “*Harai: Telaah Konsep Religi Koentjaraningrat*”, *Japanology*, Vol. 5, No.2, (2017). 17.

¹³ Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 41-44.

¹⁴ Lexy J.Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 3.

memaparkan bagaimana pandangan MUI dan WALUBI mengenai peran perempuan dalam ruang publik tersebut.

2. Sumber Data

Dilihat dari segi pengumpulan data meliputi data primer dan sekunder. Dalam pengumpulan data serta informasi dalam penelitian ini penulis menggunakan data sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah sebuah data yang berasal dari sumbernya secara langsung, data ini dikumpulkan langsung oleh peneliti yang bersifat *up to date* (data asli). Teknik yang dapat dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan data primer, yaitu bisa berupa wawancara dan observasi.

Sumber data primer dari penelitian ini, ialah:

1. Hayesti Maulida, Sekertaris Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung.
2. Sunarto, Staf Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung.
3. Kiki Fadilah, Anggota Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung.
4. Agita Larasati, Anggota Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung.
5. Andi Lie Wirawan, Ketua WALUBI Provinsi Lampung
6. Lusi Candrawati, Ketua Wanita Buddha Indonesia Provinsi Lampung.

7. Dewi Lusiane, Sekretaris Wanita Buddha Indonesia Provinsi Lampung
8. Hellen, Anggota Wanita Buddha Indonesia Provinsi Lampung
9. Endang Lucky Lestari, Anggota Wanita Buddha Indonesia Provinsi Lampung.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada¹⁵. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari literatur, studi kepustakaan, jurnal-jurnal penelitian yang berhubungan dan pendukung penelitian, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

3. Lokasi Penelitian dan Partisipan

MUI (Majelis Ulama Indonesia), Jalan Soekarno Hatta, Komplek Islamic Centre Rajabasa Bandar Lampung dan WALUBI (Perwakilan Umat Buddha Indonesia) Jalan Jendral Suprpto No. 20 Tanjung Karang Bandar Lampung. Dalam penelitian terdapat partisipan. Partisipan adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang akan di teliti. Adapun partisipan dalam penelitian ini adalah anggota Mui dan anggota Walubi.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari berbagai sumber datanya, maka pengumpulan

¹⁵ Sugiono, Metode Penelitian kuantitatif dan kualitatif (Jakarta: Alfabeta, 2005), 38.

data dapat menggunakan dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sedangkan dengan segi cara atau teknik pengumpulan dapat dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain.

a. Interview atau Wawancara

Interview biasanya juga disebut dengan metode wawancara. Menurut Sutrisno Hadi, wawancara merupakan sumber informasi studi kasus yang sangat penting, karena studi kasus berkenaan dengan manusia dan kemanusiaan. Adapun wawancara yang di pergunakan personal interview. Menurut Herman Warsito, personal interview adalah wawancara yang dalam pelaksanaan pewawancara berhadapan langsung dengan responden yang di wawancarai¹⁶.

Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dilakukan secara mendalam karena yang diwawancarai bukan hanya aspek-aspek yang dapat dikenali, melainkan juga yang ada dibalik munculnya suatu fenomena. Untuk memperoleh data mengenai peran perempuan dalam ruang publik perspektif MUI dan WALUBI, maka peneliti menggunakan metode wawancara campuran yakni dengan mengajukan pertanyaan secara terpola dan tidak terpola. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan di tujukan kepada narasumber. Adapun data yang dicari dengan wawancara adalah data tentang peran perempuan dalam ruang publik perspektif MUI dan WALUBI.

¹⁶ Herman Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia, 1993), 73.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dokumen ini digunakan oleh peneliti untuk memberikan bukti nyata yang telah dilakukan melalui wawancara. Bentuk dari dokumen dapat berupa catatan, data diri dari anggota mui dan walubi, foto, rekaman, dan lainnya. Melalui teknik dokumentasi ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian, catatan pribadi dipakai jika diperlukan dalam data pendukung yang ada di tempat atau lokasi penelitian.

c. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan penelitian¹⁷. Metode ini digunakan untuk menggali data-data langsung dari objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi di tempat penelitian yaitu MUI Provinsi Lampung kec. Rajabasa, dan WALUBI di Vihara Amurwa Bhumi Graha kec. Telukbetung Selatan.

5. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah kumpulan prosedur, skema, yang dipakai sebagai yang dipakai sebagai alat ukur atau instrumen dalam pelaksanaan penelitian. Semua metode yang dipakai peneliti selama penelitian disebut metode penelitian. Metode penelitian itu bertujuan agar penelitian dilakukan memenuhi standar ilmiah dan dapat memberikan hasil yang optimal. Adapun langkahlangkah

¹⁷ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 203.

yang ditempuh dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini secara sistematis, sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data dapat di artikan proses pemilihan data yang diperoleh di lapangan disusun dalam bentuk uraian yang lengkap dan banyak. Data tersebut di reduksi di rangkum dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting dan yang berkaitan dengan masalah.

Dengan reduksi data ini, penulis akan memilih dan memfokuskan data-data yang pokok yang didapat dari hasil pengamatan secara langsung di lapangan yang berkaitan dengan fenomena perempuan dalam ruang publik perspektif mui dan walubi, kemudian merangkumnya dengan data-data yang sesuai.

b. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan ataupun bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang dituangkan dalam bentuk uraian teks naratif.

c. Tahap Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya data tersebut akan dianalisa. Dalam proses analisa ini peneliti menggunakan metode komparatif, yaitu metode yang digunakan dengan cara membandingkan pendapat atau data yang satu dengan yang lainnya. Analisis ini membandingkan kajian aspek perbedaan dan persamaan peran wanita dalam ruang publik perspektif Mui dan Walubi. Proses selanjutnya sebagai langkah terakhir adalah pengambilan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu dengan menganalisis suatu objek yang dijadikan sebuah penelitian yang masih bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Dari analisis dan kesimpulan tersebut maka akan terjawab pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah pembahasan mengenai Peran Perempuan Dalam Ruang Publik Perspektif MUI dan WALUBI yang akan diteliti di MUI, Jl. Soekarno Hatta, Komplek Islamic Centre Rajabasa Bandar Lampung dan WALUBI, Jl. Jendral Suprpto No. 20 Tanjung Karang Bandar Lampung. Maka penelitian ini akan disusun dalam bentuk skripsi dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bagian awal yang mencakup sampul/cover skripsi, halaman sampul, halaman abstrak, halaman pernyataan orisinalitas, halaman persetujuan, halaman pengesahan, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar lampiran.

BAB I: Pendahuluan, yang meliputi: Penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Berisi tentang kajian teori, yang meliputi: peran perempuan dan ruang publik, pengertian perempuan, kedudukan perempuan, peran perempuan dalam sosial, pengertian ruang publik, bentuk-bentuk ruang publik, hak dan kewajiban dalam ruang publik.

BAB III: Gambaran Umum pandangan Mui dan Walubi tentang kedudukan perempuan, yang meliputi: gambaran umum lokasi penelitian, sejarah berdirinya Mui dan Walubi Provinsi Lampung, Visi dan Misi Mui dan Walubi Provinsi Lampung, program

kemitraan Mui dan Walubi Provinsi Lampung,
kedudukan peran perempuan Provinsi Lampung.

BAB IV: Analisis Data Penelitian, yang meliputi:
pandangan Mui tentang peran perempuan dalam
ruang publik, pandangan walubi tentang peran
perempuan dalam ruang publik, persamaan dan
perbedaan Mui dan Walubi tentang peran perempuan
dalam ruang publik.

BAB V: Penutup, yang meliputi: kesimpulan,
rekomendasi, daftar rujukan

BAB II

PERAN PEREMPUAN DAN RUANG PUBLIK

A. Pengertian Perempuan dan Ruang Publik

1) Pengertian Perempuan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Perempuan diartikan sebagai manusia yang dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui¹. Menurut Moenawar Chalil dalam bukunya yang berjudul “Nilai Wanita” menjelaskan bahwa perempuan, yang disebut juga wanita, puteri, istri, ibu adalah sejenis makhluk dari bangsa manusia yang halus kulitnya, lemah sendi tulangnya dan agak berlainan bentuk serta susunan tubuhnya dengan bentuk dan susunan tubuh laki-laki². Wanita dalam kehidupannya mempunyai peran ganda, yaitu memiliki tanggung jawab di dalam rumah (ruang publik) sebagai wanita yang bersosialisasi dalam masyarakat dan dapat juga sebagai wanita yang berkarir. Peran wanita ini secara sederhana menurut Nani Surwondo dikemukakan;

- a. Sebagai warga negara dalam hubungannya dengan hak-hak dalam bidang sipil dan politik. Termasuk perlakuan terhadap wanita dalam partisipasi tenaga kerja yang dapat disebut fungsi ekstern.
- b. Sebagai ibu dalam keluarga dan istri dalam hubungan rumah tangga yang dapat disebut fungsi intern.

Fungsi ekstern dan intern tersebut merupakan dasar peran yang dimiliki wanita, sehinggawanita harus benar-benar dapat mengatur perannya agar kedua peran tersebut tidak ada yang terabaikan. Jika tidak, maka kehidupan akan menjadi tidak seimbang.

Berdasarkan pemaparan diatas

¹ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002),

² Moenawar Chalil, *Nilai Wanita*, (Solo: Ramadhani, 1984), 11

2) Kedudukan Perempuan

Setiap manusia memiliki kedudukan tertentu dan berperan menurut kedudukannya. Kedudukan dan peran tidak dapat di pisahkan, karena peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan. Tidak ada peranan tanpa kedudukan dan tidak ada kedudukan tanpa peranan³. Kedudukan dan peran merupakan unsur-unsur baku dalam sistem lapisan sosial dalam memiliki arti penting dalam sistem sosial. Sistem sosial yang dimaksud di sini adalah adanya pola-pola yang mengatur hubungan timbal balik antar individu dalam masyarakat dan antara individu dengan masyarakatnya, dan tingkah laku individu itu sendiri⁴.

Menurut Shanty Delyana kedudukan adalah kumpulan hak-hak dan kewajiban tertentu yang dimiliki seseorang dalam menghadapi atau berinteraksi, sedangkan yang dimaksud peranan adalah tingkah laku yang diwujudkan sesuai dengan hak-hak dan kewajiban yang di miliki⁵.

Menurut Soerjono Soekanto, kedudukan (status) adalah posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial atau dapat dikatakan kedudukan merupakan tempat seseorang secara umum dalam masyarakat sehubungan dengan orang lain, dalam artian lingkungan pergaulannya, dan hak-hak kewajibannya. Peran itu sendiri merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan hak dan kewajiban yang dia miliki⁶.

Berbicara tentang perempuan adalah berbicara tentang transisi yang dibayangkan. Tidak hanya di Indonesia, dan tidak hanya di negeri-negeri Timur. Munculnya gerakan Woman's Lib menunjukkan bahwa di bagian dunia yang lebih maju, situasi transisi itu dibayangkan sebagai kaum perempuan yang lewat

³ Hidayah Sultan Salim, *Wanita-Wanita di dalam al-Qur'an*, penerjemah. Salman Harun, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), cet-1, .22

⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 264

⁵ Shanty Delyana, *Wanita dan Anak di mata hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 110

⁶ Soerjono Soekanto, Op-cit, 264-265. ‘

perjuangan menghapuskan kesenjangan yang diinginkan meraih kedudukan serta dengan kedudukan lawan jenisnya⁷.

Perempuan itu, kecuali tergolong bangsa manusia yang diberi hak oleh Tuhan yang tidak berjauhan dengan hak yang diberikan oleh kaum laki-laki. Hanya dalam beberapa perkara kaum perempuan tidak mempunyai hak seperti laki-laki, bagaimana dalam beberapa perkara juga kaum perempuan, karena memang dari asal mula kejadiannya sudah dijadikan berlainan atau berbeda⁸.

Sehubungan dengan itu, di Indonesia misalnya Pada dekade terakhir ini terlihat gejala yang menunjukkan adanya “trend kebangunan” kaum wanita yang memanasifasikan dirinya dalam bentuk penyamaan hak, kewajiban, dan peranan dengan kaum pria dalam berbagai segi kehidupan. Karena itulah muncul terminologi wanita karir, wanita profesi, wanita pekerja, bahkan berbagai kajian mengensi gender, sebagai bagian dari fenomena kebangkitan wanita dunia dan lain sebagainya⁹. Secara singkat dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan perempuan, yaitu perempuan mempunyai hak untuk bekerja selama membutuhkannya, atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara.

Kedudukan dan peran dalam masyarakat patriarkhi harus dilakukan, apabila masyarakat tetap mempertahankan struktur yang masih ada. Interaksi yang terjadi dalam masyarakat sangat tergantung pada kedudukan yang dimiliki setiap individu. Untuk menjaga tatanan yang ada, setiap individu dipaksa meninggalkan keinginan dirinya dan mengikuti norma-norma dan aturan dalam masyarakat yang sudah diterapkan. Pengaruh budaya patriarkhi yang mendominasi kehidupan masyarakat mengakibatkan ter subordinasi dari persaingan mendapatkan kedudukan dan peran yang signifikan secara sosial, padahal

⁷ Mansour Fakih, Ratna Megawangi dkk, *membincang Feminisme: Dirkursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 101

⁸ Moenawar Chalil, *Nilai Wanita*, (Solo: Ramadhani, 1984), 47

⁹ Syahrin Harahap, *islam dinamis menegakkan nilai-nilai ajaran al-Qur'an dalam kehidupan modern di indonesia*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1997) 143

kedudukan dan peran merupakan unsur-unsur baku dalam system lapisan dan mempunyai arti yang penting dalam sistim sosial. Jadi dapat disimpulkan kedudukan dan peranantara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat sebenarnya adalah hasil dari dominasi wacana budaya patriarkhi masyarakat itu sendiri.

Kedudukan perempuan dalam masyarakat lebih banyak ditentukan oleh faktor-faktor di luar dirinya, dalam hal ini masyarakat mengatur keadaan perempuan melalui standar-standar yang disepakati bersama.¹⁰ Terbentuknya identitas perempuan dalam masyarakat patriarkhi mengakibatkan perempuan mengabaikan kehendaknya sendiri dan menempatkan kepentingan yang di pandang lebih besar dari kepentingannya sendiri. Kedudukan perempuan dalam masyarakat patriarkhi terbatas pada Negara asalnya, tidak ada kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri tentang kehidupannya. Posisi perempuan selalu lebih lemah dibandingkan laki-laki, perempuan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Hal ini terjadi karena laki-laki dipandang sebaga ipemimpin yang mengambil keputusan.¹¹

3) Peran perempuan dalam sosial

Karena struktur sosial masyarakat, sering kali terbagi menjadi pria dan perempuan. Adanya perpecahan tersebut sering kali menimbulkan kerugian di pihak perempuan. Sebagian orang beranggapan bahwa pekerjaan perempuan adalah mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian,dan mengurus anak. Padahal mereka juga bekerja diluar rumah, laki-laki disisi lain memiliki sedikit tanggung jawab untuk pekerjaan rumah tangga. Paradigma sosial manusia adalah untuk mencari nafkah, yang sepertinya merupakan kewajiban

¹⁰ PROF. DR. I.B. WIRAWAN, *TEORI-TEORI SOSIAL DALAM TIGA PARADIGMA*, ed. KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 1st ed. (Jakarta, 2012). 136

¹¹ Indah Ahdiah, "Peran-Peran Perempuan Dalam Masyarakat," *Jurnal Academica* 05, no. 02 (2013): 1085–92.

baginya. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan tugas sehari-hari disebabkan oleh perbedaan mereka. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan disebabkan oleh beberapa hal masalah. Masalah yang terkait dengan konten dan pertanyaan yang terkait dengan kedua peran . secara biologis memang ada perbedaan antara keduanya, namun hal itu mempengaruhi interpretasi masyarakat. Disini muncul masalah terkait ketimpangan peran. Dalam setiap masyarakat, peran laki-laki dan perempuan berbeda menurut masyarakat, status dan kekuasaan. Perbedaan perkembangan peran gender dalam masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor, ,mulai dari lingkungan alam hingga cerita dan mitos yang digunakan untuk memecahkan teka-teki perbedaan gender. Secara materi, kedua laki-laki dan perempuan ini tidak berbeda, hal ini dapat dilihat dari sifat-sifat kemanusiaannya, karena laki-laki dan perempuan mempunyai kodrat yang sama, tetapi pada dasarnya itu ada sisi mental bukan disisi fisik. Hal ini di dasarkan pada fakta bahwa tubuh tidak berperan dalam humanisasi manusia melainkan sebagai pelengkap substansi manusia. Pada dasarnya manusia terdiri dari ruh (jiwa) yang bukan laki-laki maupun perempuan, sedangkan badan (laki-laki dan perempuan) hanyalah alat untuk perkembangan hidup duniawi.

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan berarti bahwa masing-masing memiliki keistimewaan dalam peran dan tugasnya dan tidak berarti bahwa masing-masing memiliki keistimewaan dalam peran dan tugasnya dan tidak berarti bahwa keduanya memiliki status yang lebih tinggi dari yang lain. Kedudukan keduanya yang setara memunculkan peran bahwa keduanya adalah mitra dalam meningkatkan diri sebagai manusia. Dari segi peran, jika kita memahami konsep substansi manusia, maka dalam hal ini tidak masalah kita membicarakan peran laki-laki dan perempuan dalam aspek biologis, karena jelas keduanya memiliki peran

masing-masing, apa yang wajar bagi mereka namun, masalah lain muncul dari perbedaan laki-laki dan perempuan yaitu adanya gambaran mental yang seolah-olah diendapkan pada mereka, alam bawah sadar ialah jika seseorang memiliki atribut biologis, maka itu juga menjadi atribut jender yang bersangkutan dan selanjutnya akan menentukan peran sosial dalam masyarakat¹².

Konsep jender mengacu pada seperangkat sifat, peran dan tanggung jawab, fungsi, hak dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan berkembang, sehingga timbullah dikotomi maskulin (laki-laki) dan feminin (perempuan). Pembagian kerja jender tradisional (jender base division of labour) menempatkan pembagian kerja perempuan di rumah (sektor domestik) dan laki-laki bekerja di luar rumah (sektor publik). Pembakuan peran suami dan istri secara dikotomis publik-produktif diperankan oleh suami, sedangkan peran domestik-reproduktif merupakan peran istri telah mengakar di masyarakat. Peran publik perempuan seringkali dipermasalahkan dari jenis kelaminnya atau sering diistilahkan dengan kata jender dalam persoalan kerja. Peran-peran di wilayah publik mempunyai karakteristik menantang, dinamis, leluasa, independen, diatur dengan jam kerja, prestasi, gaji, jenjang karier, kemudian dikenal dengan peran produksi yang langsung menghasilkan uang. Sebaliknya karakteristik peran pada ranah domestik antara lain: statis, sempit, tergantung, tidak ada jenjang karier dan penghargaan, tidak menghasilkan uang, tidak mengenal jadwal kerja, yang kemudian dikenal dengan peran reproduksi.

¹²Halida Nabilla Salfa , *peran sosial perempuan dalam masyarakat dan implikasinya terhadap penempatan perempuan*, di akses 19 Februari 2023
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/3163>

Pembagian kerja tersebut oleh kaum feminis sering disebut dengan istilah pembagian kerja seksual, yaitu suatu proses kerja yang diatur secara hirarkhis, yang menciptakan kategori-kategori pekerjaan subordinat yang dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin dan stereotipe jenis kelamin tertentu. Jenis kelamin dan gender sering dipahami sebagai kesamaan yang menentukan antara keduanya. Hal ini tentunya tidak lepas dari aspek biologis yang ada. Seks dapat dipahami sebagai sesuatu yang secara biologis terkait dengan pembagian fisiologis atau anatomi manusia. Seks dalam hal ini menekankan pada kepemilikan organ reproduksi dan peran bioseksualnya. Jender telah menjadi konsep budaya yang berupaya menciptakan perbedaan dalam hal peran, sikap, mentalitas dan sifat emosional. Laki-laki dan perempuan berkembang dalam masyarakat. Namun, di ruang publik, pekerjaan spesifik untuk setiap gender dikaitkan dengan peran seksual dan dikenal sebagai pekerjaan produktif bagi laki-laki dan pekerjaan reproduktif bagi perempuan.

Kerja produktif adalah proses kerja yang menghasilkan sesuatu. Dalam masyarakat kapitalis, apa yang diproduksi biasanya diinterpretasikan dalam bentuk nilai tukar. Dalam pembahasan gender, konsep kerja produktif sering dikaitkan dengan pekerjaan publik (public sector).¹³ Laki-laki mengambil peran produktif karena mereka lebih kuat, memiliki struktur dan kekuatan fisik yang lebih mendukung, lebih tangguh secara emosional dan mental, lebih bersedia menghadapi tantangan, lebih bertanggung jawab, dan lebih mandiri. Meskipun peran reproduksi dimiliki oleh perempuan, dikatakan bahwa perempuan memiliki fungsi reproduksi biologis seperti menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Peran yang hampir stereotip ditugaskan

¹³ Puji Lestari, *peranan dan status perempuan dalam sistem sosial*, diakses 19 Februari 2023 <https://journal.uny.ac.id/index.php/dimensia/article/view/3439>

kepadanya: bertani, beternak, merawat dan membesarkan anak, memasak, mencuci, pekerjaan rumah tangga.

Masyarakat cenderung menganggap bahwa seksisme dan pembagian kerja itu wajar. Stereotip yang dianggap wajar menimbulkan ketidakadilan gender baik bagi perempuan maupun laki-laki. Pria mendapatkan bagian yang lebih menguntungkan daripada wanita. Asumsi budaya seperti itu secara otomatis mengambil peran yang lebih luas bagi laki-laki dan memberi mereka status sosial yang lebih tinggi daripada perempuan. Dalam kehidupan sehari-hari antara laki-laki dan perempuan selalu terjadi konflik dan ketegangan gender. Perempuan masih memiliki keinginan untuk bergerak bebas guna meningkatkan status dan kepercayaan dirinya, namun budaya masyarakat membatasi keinginan tersebut, terutama bagi mereka yang telah menikah, apalagi jika sudah memiliki anak. Perempuan menghadapi peran ganda (double burden) dan harus bekerja secara mandiri di satu sisi. Di sisi lain, pola asuh dan pengasuhan keluarga perlu lebih konsisten.

Pada abad ke-19, wanita semakin sadar akan pesatnya perkembangan di luar rumah. Pada saat yang sama, kami menyadari bahwa norma domestik mencegah perempuan mengambil peran ganda. Pembatasan ini menjadi dasar tumbuhnya keinginan baru bagi perempuan untuk terlibat di sektor publik. Selain dari lingkungan keluarga, tidak dapat disangkal bahwa perempuan adalah bagian dari masyarakat. Dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat ini, partisipasinya dalam kehidupan publik (publik) juga diperlukan bagi perkembangan masyarakat. Dalam hal ini, peran utama perempuan sebagai ibu dan pengurus rumah tangga yang sering disebut sebagai peran domestik, tidak berarti bahwa perempuan harus dibatasi pada peran utama tersebut. di sektor publik.

Mansur Fakhri mengatakan bahwa pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya sama.

Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan tidak boleh berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki bisa mengurus anak, mencuci pakaian dan memasak, sedangkan perempuan bisa bekerja di luar rumah. Komposisi kedua karya tersebut didasarkan pada konstruksi budaya yang lazim di masyarakat. Kesalahpahaman yang menjadi paradigma masyarakat adalah laki-laki memiliki otoritas dalam urusan publik dan perempuan dalam ranah domestik. Karena itu, ketika membahas masalah hubungan kerja antara laki-laki dan perempuan, ia menekankan bahwa ini adalah konstruksi budaya daripada kodrat ilahi.

Gagasan ini dapat berubah dari waktu ke waktu dan juga dapat bervariasi dari satu daerah ke daerah lainnya, karena konstruksi gender lebih merupakan bentukan sosial daripada bentukan alamiah. Jadi masyarakat membentuk maskulinitas dan feminitas seseorang. Karena formasi ini sangat dibakukan oleh semua jenis norma adat, adat, budaya dan hukum, dan bahkan oleh agama, terlihat seperti itu. Ini semua adalah karunia alam atau Tuhan dan harus diterima sebagaimana adanya dan tidak boleh dipertanyakan lagi.

Diharapkan dengan memahami isu gender akan mengarah pada cara pandang yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi penuh dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan intelektual dan dihormati setara dengan laki-laki. Mereka juga mampu atau terbuka terhadap kemungkinan untuk berpartisipasi penuh dan mengasuh anak mereka di rumah. Adanya studi gender dengan pendekatan historis dapat mengungkap sebab-sebab politik dan sosial yang berujung pada merosotnya status perempuan dalam kehidupan publik.¹⁴

¹⁴Melda Yunita, *peran perempuan dalam memenuhi kebutuhan keluarga*, diakses pada 20 Februari 2023
<https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA/article/view/12840>

B.Ruang Publik

a) Pengertian Ruang Publik

Ruang publik adalah ruang yang berfungsi untuk tempat menampung aktivitas masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok, dimana bentuk ruang publik ini sangat tergantung pada pola dan susunan massa bangunan. Menurut Carr, tipologi ruang publik penekanan kepada karakter kegiatannya, lokasi dan proses pembentuknya. Carr dkk membagi tipologi ruang publik diantaranya adalah: Jalan, taman bermain, jalur hijau, perbelanjaan dalam ruang, ruang spontan dalam lingkungan hunian, ruang terbuka komunitas, square dan plaza, pasar, tepi air. Carr dalam Carmona, mengemukakan adanya keterlibatan pasif (*passive engagement*) dan aktif (*active engagement*) dalam pemanfaatan ruang publik. Kedua bentuk pengalaman ini terjadi sebagai akibat adanya proses interaksi tersebut, dimana pengguna ruang publik dapat melakukan interaksi dengan cara yang berbeda. Ruang sebagai wadah harus mampu menyediakan lingkungan yang kondusif bagi terpenuhinya syarat interaksi, yaitu memberi peluang bagi terjadinya kontak dan komunikasi sosial. Interaksi sosial dapat terjadi dalam bentuk aktivitas yang pasif seperti sekedar duduk menikmati suasana atau mengamati situasi dan dapat pula terjadi secara aktif dengan berbincang bersama orang lain membicarakan suatu topik atau bahkan melakukan kegiatan bersama.

Sedangkan menurut Roger Scurton setiap ruang publik memiliki makna sebagai berikut: sebuah lokasi yang didesain seminimal apapun, memiliki akses yang besar terhadap lingkungan sekitar, tempat bertemunya masyarakat/pengguna ruang publik dan perilaku masyarakat pengguna ruang publik satu sama lain mengikuti norma-norma yang berlaku setempat.¹⁵ Ruang Publik Secara Ideal Menurut Carr, ruang

¹⁵Edi Purwanto, "Privatisasi Ruang Publik Dari Civic Centre Menjadi Central Business District (Belajar Dari Kasus Kawasan Simpang Lima Semarang)," *Jurnal Tataloka* 16, no. 3 (2014): 153, <https://doi.org/10.14710/tataloka.16.3.153-167>.

publik harus memiliki tiga hal yaitu responsif, demokratis, dan bermakna. Responsif dalam arti ruang public adalah ruang yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan dan kepentingan luas yang memiliki fungsi lingkungan hidup. Artinya ruang public dapat digunakan oleh masyarakat umum dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya serta akses bagi berbagai kondisi fisik manusia. Memiliki arti ruang publik harus memiliki tautan antara manusia, ruang, dan dunia luas dengan konteks sosial. Dengan kata lain, ada system pemaknaan dalam ruang publik.¹⁶

b) Bentuk-Bentuk Ruang Publik

Berdasarkan ruang publik, ruang public dapat dibagi menjadi beberapa tipologi antara lain:

1. External public space. Ruang public jenis ini biasanya berbentuk ruang luar yang dapat diakses oleh semua orang (publik) seperti taman kota, alun-alun, jalur pejalan kaki, dan lain sebagainya.
2. Internal public space. Ruang public jenis ini berupa fasilitas umum yang dikelola pemerintah dan dapat diakses oleh warga secara bebas tanpa ada batasan tertentu, seperti kantor pos, kantor polisi, rumah sakit dan pusat pelayanan warga lainnya.
3. External and internal “quasi” public space. Ruang public jenis ini berupa fasilitas umum yang biasanya dikelola oleh sector privat dan ada batasan atau aturan yang harus dipatuhi warga, seperti mall, diskotik, restoran dan lain sebagainya.

Berdasarkan fungsinya secara umum dapat dibagi menjadi beberapa tipologi, antara lain :

a) Positive space

Ruang ini berupa ruang publik yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif dan biasanya dikelola oleh

¹⁶Dedi Hantono, Yuanita F D Sidabutar, and Ully I M Hanafiah, “Kajian Ruang Publik Kota Antara Aktivitas Dan Keterbatasan,” *Langkau Betang: Jurnal Arsitektur* 5, no. 2 (2018): 80, <https://doi.org/10.26418/lantang.v5i2.29387>.

pemerintah. Bentukdariruanginiantara lain ruangalami/semi alami, ruangpublik dan ruangterbukapublik.

b) Negative space

Ruang ini berupa ruang publik yang tidak dapat dimanfaatkan bagi kegiatan publik secara optimal karena memiliki fungsi yang tidak sesuai dengan kenyamanan dan keamanan aktivitas sosial serta kondisinya yang tidak dikelola dengan baik. Bentukdariruanginiantara lain ruangpergerakan, ruangservis dan ruang-ruang ysang ditinggalkan karena kurang baiknya proses perencanaan.

c) Ambiguous space

Ruang ini adalah ruang yang dipergunakan untuk aktivitas peralihan dari kegiatan utama warga yang biasanya berbentuk seperti ruang bersantai di pertokoan, café, rumah peribadatan, ruang rekreasi, dan lain sebagainya.

d) Private space

Ruang ini berupa ruang yang dimiliki secara privat oleh warga yang biasanya berbentuk ruang terbuka privat, halaman rumah dan ruang didalam bangunan.

c) Hak dan Kewajiban dalam Ruang Publik

Fenomena yang berlangsung saat ini di Indonesia adalah semakin hari semakin banyak perempuan Indonesia dalam usia dewasa muda mempunyai peluang untuk berkarya di dunia public disamping menjadi ibu rumah tangga. Mereka melakukannya terutama tidak karena keharusan ekonomi, tetapi atas dasar pilihan. Mereka melakukannya terutama tidak karena keharusan ekonomi, tetapi atas dasar pilihan. Di kota-kota besar, fungsi perempuan sebagai ibu rumah tangga ini semakin berkurang peranannya karena beberapa penyebab, di antara penyebabnya ialah karena tuntutan kebutuhan rumah tangga, atau dorongan berprestasi sebagai orang modern.

Perempuan semakin banyak ditemui mempunyai karier sendiri, bahkan terkadang melebihi golongan laki-laki. Islam tidak mengatur wilayah perempuan dan laki-laki secara skematis. Islam menyisakan wilayah-wilayah tertentu untuk diatur oleh akal manusia berdasarkan tuntutan tuntutan yang senantiasa berkembang. Penegasan Allah SWT bahwa perempuan dan laki-laki diberi hak dan peluang yang sama baik dalam hal beramal, bekerja maupun prestasi dapat disimak dalam Al- Quran (QS. Al-Nisa" [4]: 124)

نَيِّبًا يُّظَلِّمُونَ وَلَا الْجَنَّةَ يَدْخُلُونَ ۚ كَ فَأُولَىٰ مُؤْمِنٌ وَهُوَ أَنْثَىٰ أَوْ ذَكَرٍ مِنَ الصَّالِحِينَ مَنْ يَعْمَلْ وَمَنْ

“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan orang yang beriman, maka mereka itu masuk kedalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun.”

Ayat ini menjamin (memotivasi) perempuan maupun laki-laki yang ingin berkarier dalam bidang apa saja yang tergolong pekerjaan baik (halal) akan mendapatkan keberhasilan dan kebahagiaan dan tidak pula akan dirugikan. Menurut Syekh Mutawalli As Sya"rawi seorang perempuan diperbolehkan untuk mengetahui sebesar apa kemampuannya dalam berkarier di ranah publik dengan syarat tanpa harus mengabaikan kewajiban rumah tangga selaku istri dan ibu yang bertugas untuk mendidik anaknya dan juga haruslah masih dalam koridor yang telah ditentukan oleh agama.¹⁷

Quraish Shihab menjelaskan bahwa perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut, serta pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan serta dapat pula menghindari dampak-dampak negative dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya, bahwasanya dengan persetujuan suami dan sesuai dengan tingkat pendidikan,

¹⁷Asman, "Hak Dan Kewajiban Perempuan Dalam Masa Iddah - Tirto.ID," *BORNEO: Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2020): 1–16, <https://tirto.id/hak-dan-kewajiban-perempuan-dalam-masa-iddah-eBPg>.

tak ada halangan bagi perempuan untuk berkarier. Dengan catatan tidak boleh melupakan peran pendidikan kepada anak dan tanggung jawab pada suami. Namun pendapat itu berbeda dengan pendapat ulama klasik, yang mana menurut jumbuh ulama klasik menyatakan bahwa tidak dibenarkan seorang perempuan itu keluar rumah tanpa ada sebab yang dibenarkan dalam pandang agama. Itu pun dengan syarat dapat memelihara kesucian dan kehormatannya. Selanjutnya bicara tentang hak perempuan yang berkaitan dengan ruang publik, dalam hal pendidikan, seperti yang di contohkan, semua anak-anaknya bebas untuk memilih pilihannya sendiri tidak ada paksaan dalam mencari pendidikan. Beliau tidak membeda-bedakan antara laki-laki dengan perempuan.

Pendidikan itu wajib bagi setiap muslim muslimat tidak ada pengecualian, mulai dari lahir hingga liang lahat. Pemikiran beliau ini mungkin berbeda dengan cara pendidikan yang dahulu beliau dapatkan dari sang ayah. Dulu sang ayah tidak membolehkan untuk mengenyam pendidikan di luar madrasah. Berbeda zaman, mungkin ketika zaman sang ayah tidak mengizinkan anaknya untuk sekolah di luar lingkupnya, dikarenakan banyak dampak negatifnya jika sianak jauh dari pengawasan orang tua. Namun ketika zaman sekarang, banyak cara pengawasan dan pengontrolan yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk tetap dekat dengan sang anak. Membahas tentang kepemimpinan perempuan yang dimaksud dengan kepemimpinan perempuan ialah bukan dominasi perempuan atas kaum laki-laki, karena Islam adalah agama keadilan yang menolak kezalimandalambentukapa pun, termasuk ke zaliman kaum perempuan atas kaum laki-laki. Kepemimpinan perempuan tidak berarti perempuan hendak merebut posisi dan peran kepemimpinan laki-laki, tetapi perempuan dan laki-laki dapat bersama-sama menyalurkan potensi kepemimpinan mereka sepenuhnya tanpa superioritas pada satu sama lain.

Kepemimpinan perempuan merupakan tantangan bersama bagi para laki-laki dan perempuan, sebagai „equal partner“ untuk mewujudkan kehidupan bersama yang lebih sinergik, penuh kesejahteraan lahirbatin, dan menggapaikeselamatan dunia

akhirat. Dalam politik, perempuan harus melibatkan diri secara aktif dalam proses pembangunan bangsa. Perempuan diminta untuk setiap waktu memperbesar keterwakilannya dalam pemerintahan baik pada jalur eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Perempuan juga diminta untuk menjadi salah satu kekuatan moral (moral force) yang diharapkan mampu memberantas keburukan bangsa. Kaum perempuan mempunyai hak untuk berperan dalam pembangunan seperti halnya kaum lelaki,¹⁸ sebagaimana diperlihatkan dalam berbagai peristiwa sejarah.

Tujuan dari perempuan harus terlibat dalam kehidupan pengaturan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak lain agar perempuan dapat menyuarakan kepentingan praktis dan strategis, peranan dan aspirasinya, agar dapat ikut dalam pengambilan keputusan yang memungkinkan perempuan dapat meningkatkan kualitas kinerja perannya dalam ranah publik maupun domestic¹⁹. Wilayah politik pada dasarnya kewajiban yang kekuatan tuntutananya bisa masuk kategori wajib ain atau hanya berhenti sebagai wajib kifayah. Ini sangat tergantung pada definisi wilayah politik (sesuatu yang cocok bagi perbaikan manusia untuk meniti jalan selamat dunia dan akhirat), maka tuntutan itu mempunyai kekuatan wajib ain. Namun apa bila konsep negara bangsa, per undang-undangan, persaingan kekuasaan, itu kekuatannya atermasuk dalam wilayah wajib kifayah. Format pemahaman seperti ini mengindikasikan kegiatan politik adalah tanggung jawab individual dan sekaligus tanggung jawab sosial, karena setiap individu di manapun tempatnya mempunyai kewajiban untuk membantu terlaksananya wajib kifayah baik yang dilaksanakan oleh perorangan maupun oleh Negara.

¹⁸ Nan Rahminawati, "Isu Kesetaraan Laki-Laki dan Perempuan (Bias Gender) Nan Rahminawati," *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 17, no. 3 (2001): 272–83.

¹⁹Nurhayati B and Mal Al Fahnum, "Hak-Hak Perempuan Menurut Perspektif Al-Quran," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 16, no. 2 (2017): 186, <https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4139>.

Dalam pengertian ini setiap Muslim, pria atau wanita wajib mendukung Negara akan melaksanakan kewajiban tersebut kifayah. Masih membahas politik, Islam dengan mempertimbangkan pentingnya factor kompetensi. Untuk wanita yang bias dalam dunia politik, dia bebas untuk memainkan beberapa bagian dalam politik. Sementara Mereka yang tidak mampu harus ingat bahwa konsep tanggung jawab adalah satu arah Motivasi sangat erat kaitannya dengan kemampuan. Hukum taklif harus bias dapat diakses dengan kemampuan langsung karena praktistida kecuali mungkin. Dalam Q.s al-Baqarah ayat 286:

وَسِعَهَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يُكَلِّفُ لَا

“Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya.”

Sebagian orang memandang wanita sebagai seorang yang menyimpang dan tidak bertindak secara seimbang. Perasaannya lebih tinggi dari kecepatannya dan seterusnya Kekuatan politik membutuhkan visi yang rasional dan ketegasan, sesuatu yang dianggap sebagai kelemahan wanita. Karena politik ini perempuan dilarang untuk melindungi masyarakat agar tidak tersentak dan jatuh. Apalagi, dunia politik akan menjadi beban untuk wanita tidak akan bias memakai hanya akan melakukan tugas utama dalam keluarga adalah kontrol yang longgar.

Pemandangan seperti ini mata berdasarkan teori maslahat dan bukan pada pandangan fundamental tidak sejalan dengan perkembangan bentuk negara menurut ruang dan waktu. Ada masalah terkait keluarga dan politik ada dasar untuk berdiri di dalam hukum taklif tidak ada beban kewajiban kecuali yang sesuai dengan kemampuannya. Tidak ada kecuali, baik laki-laki maupun perempuan, jika tidak ada kemampuan dan keahlian tertentu hak atas kewajiban hilang dengan sendirinya Jadi, ketika berbicara tentang hak perempuan di depan umum, penulis menyimpulkan bahwa manusia sangat-sangat peduli dengan hak-hak perempuan, pemikiran yang dimunculkannya melalui pembelajaran, pengalaman, dan wawasannya, semua itu dia diterapkan dengan mendidik dan memberi contoh kepada anak-

anak dan siswa yang menjadi pembebas di zaman Orde Baru apalagi di era inovasi yang mengingatkan kita pada angka Raden Ajeng Kartini.²⁰

Seorang pembela gagasan kesetaraan pada saat itu kolonialisme. Dalam visinya tentang kesetaraan adalah upaya reformasi budaya untuk menekankan pentingnya pencerahan perempuan dan perubahan yang disebabkan oleh jejak mereka kesuksesan wanita Indonesia hingga saat ini. reformasi budaya ini bukanlah upaya untuk menginterpretasikan budaya tokoh Raden Ajeng Kartini dan tempatnya dalam sejarah perjuangan perempuan Indonesia. Juga bukan upaya untuk menegaskan kembali simbolisasi cita-cita feminine²¹.

Indonesia dalam sejarah. Seperti Christina Martha Tiahahu, Cut Nya Dien, Cut Mutia, Dewi Sartika dan banyak pejuang wanita lainnya di seluruh dunia daerah terpencil di negara itu tidak terdaftar. Tapi sebuah perubahan pola kemarin atau tingkat pemikiran tinggi. Diperlukan Partisipasi dan peran perempuan sangat menentukan keberhasilan serangkaian reformasi budaya saat ini sedang berlangsung dari karakter wanita seperti mereka, kita belajar tentang semangat belajar dan pentingnya meningkatkan level refleksi. bagaimanapun, kita memiliki spesifikasi karakteristik dari perjuangan pembebas perempuan, yaitu pada zamannya mampu mengoperasikan pergeseran paradigma. Mengenai tanggung jawab perempuan ketika mereka tampil di depan umum, dia percaya bahwa wanita karir masih perlu menggunakan waktu mereka untuk anak-anak dan laki-laki. Komunikasi menjadi sangat penting dalam hal bagaimana tentang pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Jika gadis-gadis itu sibuk dengan kehidupan sehari-hari dan karir mereka, mereka seharusnya tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai istri atau ibu saat sibuk dia pasti memiliki momen dalam kehidupan sehari-harinya sehari hanya untuk bertemu anak,

²⁰ Hayesti Maulida, "*hak perempuan*", Juli 5, 2023.

²¹ Ina Salmah Febriani, "*Keseimbangan Karakter Feminin Dan Maskulin Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani*," *Tsaqofah* 19, no. 1 (2021): 45, <https://doi.org/10.32678/tsaqofah.v19i1.5298>.

sekedar untuk makan siang atau makan malam. Jika tidak memungkinkan untuk bertemu²².

Hal itu perempuan yang bekerja di ruang publik masih harus bersatu, statusnya sebagai ibu dan istri. Baginya, pria dan wanita harus saling menghormati untuk menciptakan keharmonisan antara keluarga dan karir. Dengan kata lain, sebagai perempuan yang membenamkan dirinya di ruang publik dalam kesehariannya jika Anda sibuk bekerja, Anda harus meluangkan waktu untuk bertemu keluarga, berikan suamimu yang terbaik dan jangan lupa tanggungjawab untuk merawat anak. Jika Anda mencermati ide-ide yang prof. Akrab Alawiyah adalah pemikiran feminis. Berbeda dengan seorang feminis-feminis barat untuk meningkatkan peran dan status perempuan dalam rangka mendapatkan hak-hak perempuan sehingga dia harus mendapatkan lebih banyak menekankan identitas Muslim itu sendiri. Jangan biarkan wanita kehilangan identitasnya pendukung agama besar, kemudian runtuh kedalam situasi modern yang tidak berharga yang pada akhirnya menjadikan perempuan sebagai komoditas hidup materialistis. Sejak kecil ia menerima ajaran Islam dan semangat uang dari ayahnya sebagai warisan paling berharga dalam hidupnya, membuatnya semakin yakin bahwa Islam memberikan hak-hak perempuan sepenuhnya, termasuk hak untuk belajar, hak untuk hidup bermartabat dan hak berperan aktif dalam masyarakat.

²²Haifa A Jawab, *Otentitas Hak-Hak Perempuan Perspektif Islam Atas Kesetaraan Gender*. 68

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa peran perempuan di ruang public perspektif MUI dan WALUBI Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Pandangan MUI memandang urusan public adalah urusan bersama, baik laki-laki maupun perempuan. Laki-laki tidak sekadar berjalan di sector publik dan perempuan berjalan di sector domestik. Keduanya memiliki peran yang sama. Menurut penelitian ini, dengan adanya peran perempuan di sector public justru memperkuat dampak kebaikan. Wacana bahwa perempuan dan laki-laki ibarat matahari dan bulan yang harus beredar di orbit masing-masing, laki-laki di sector publik dan perempuan di sector domestik, adalah kurang tepat. MUI menjelaskan bahwasannya perempuan memiliki hak dan kedudukan yang sama sebagai hamba Allah dalam berkiprah. Yang membedakan perempuan dan laki-laki hanya kodratnya dan kodrat itu hanya haid, hamil, menyusui dan melahirkan.
2. Pandangan walubi tentang perempuan harus setara, tidak membeda-bedakan antara laki-laki dengan perempuan, karena sama-sama dimata tuhan. Hanya yang membedakan pada saat bersembah sujud kepada tuhan yang perempuan dan laki-laki terpisah sama halnya dengan dimasjid. Setiap pengurusan walubi hampir semua wanita ikut terlibat dalam keanggotaan. Peran wanita dalam sosial lebih menonjol semisal donor darah, pada hakikatnya peran wanita budhis ini di bidang sosial.

3. Pandangan MUI dan Walubi terhadap peran perempuan dalam ruang public terdapat persamaan dan perbedaan dalam pandangannya. Persamaannya antara lain, kitab suci Al-Quran dan Tripitaka dalam kandungannya terdapat kisah mengenai sosok wanita yang berperan dalam ruang publik di ranah politik. Pada pandangan MUI dan Walubi mengenai peran wanita dalam ruang publik juga terdapat perbedaannya, yaitu Al-Quran sangat jelas membicarakan persoalan peran wanita dalam ruang publik di ranah politik, sedangkan budha tidak terlalu begitu jelas.

B. Saran

Berdasarkan kepada kesimpulan diatas maka penulis memiliki beberapa rekomendasi atau saran, yakni sebagai berikut:

1. Setiap manusia memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, terlepas itu apakah dia perempuan atau laki-laki. Seorang perempuan bisa menjadi orang yang lebih baik ketimbang seorang laki-laki, karena kemampuan yang dimiliki seorang perempuan sama dengan apa yang dimiliki laki-laki. Jadi tidak salah kalau seorang perempuan bisa menjadi pemimpin dalam suatu kelompok tertentu. Oleh karena itu jangan melihat dari fisiknya atau jenis kelaminnya.
2. Di perbolehkan seorang perempuan sebagai istri untuk bekerja pada sektor publik, selama itu tidak menjadikannya lupa dan mengabaikan perannya dalam memelihara norma-norma agama, adat dan susila, serta dapat memenuhi syarat-syarat dan etika istri yang bekerja diluar rumah.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Dadang Khahmad, Metode Penelitian Agama, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000)
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002)
- F. Budi Hardiman, Ruang Publik, (yogyakarta: Kanisius, 2010)
- Haifa A Jawab, Otentitas Hak-Hak Perempuan Perspektif Islam Atas Kesetaraan Gender
- Herman Warsito, Pengantar Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Gramedia, 1993)
- Lexy J. Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021)
- Mahathera Piyadasi, Spektrum Ajaran Buddha, (Jakarta: PT Bintang Baru Indonesia Perkasa Jaya, 2003)
- Mansour Fakih, Ratna Megawangi dkk, Membincang Feminisme: Dirkursus Gender Perspektif Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996)
- M. Masyur Amin, Wanita dalam Percakapan Antar Agama, (Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1992)

- Moenawar Chalil, Nilai Wanita, (Solo: Ramadhani, 1984)
- Prof. Dr. I.B. Wirawan. 2012. Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma. Jakarta: Prenada Media Group.
- Rahman Zainuddin, Kekuasaan dan Negara, Pemikiran Politik Ibnu Khaldun, (Jakarta: Gramedia, 1992)
- Salim dan Syahrums, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2012)
- Shanty Dellyana, Wanita dan Anak di Mata hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1988)
- Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Jakarta: Alfabeta, 2005)
- Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)
- Syahrin Harahap, Islam Dinamis Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran Al-Qur'an dalam Kehidupan Modern di Indonesia, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1997)

Referensi Jurnal

- “56559-ID-Wanita-Dalam-Pandangan-Agama-Dan-Bangsa,” n.d.
- Ahdiah, Indah. “Peran-Peran Perempuan Dalam Masyarakat.” *Jurnal Academica* 05, no. 02 (2013): 1085–92.
- Ananda, Khansa, Dewi Wahyudi, and Siti Maizul. “Legal Protection for Children and Women against Violence in the Perspective of Pancasila Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Yang

- Mengintai Pada Anak- Anak Dan Wanita Dalam Sudut Pandang Pancasila” 6, no. 2 (2023): 43–48.
- Asman. “Hak Dan Kewajiban Perempuan Dalam Masa Iddah - Tirta.ID.” *BORNEO: Journal of Islamic Studies* 3, no. 2 (2020): 1–16. <https://tirta.id/hak-dan-kewajiban-perempuan-dalam-masa-iddah-eBPg>.
- B, Nurhayati, and Mal Al Fahnum. “Hak-Hak Perempuan Menurut Perspektif Al-Quran.” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 16, no. 2 (2017): 186. <https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4139>.
- Daud, Fathonah K., and Aah Tsamrotul Fuadah. “Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Fatwa MUI Bidang Munakahat Prespektif Maslahah.” *Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2021): 16–42.
- Dewi, Metta Puspita. “Peran Dan Tantangan Penyuluh Agama Buddha Di Desa Kalimanggis Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Dalam Mengendalikan Ingroup Favoritism.” *Agama Buddha Dan Ilmu Pengetahuan*, 2019, 50–67.
- Febriani, Ina Salmah. “Keseimbangan Karakter Feminin Dan Maskulin Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani.” *Tsaqofah* 19, no. 1 (2021): 45. <https://doi.org/10.32678/tsaqofah.v19i1.5298>.
- Hantono, Dedi, Yuanita F D Sidabutar, and Ully I M Hanafiah. “Kajian Ruang Publik Kota Antara Aktivitas Dan Keterbatasan.” *Langkau Betang: Jurnal Arsitektur* 5, no. 2 (2018): 80. <https://doi.org/10.26418/lantang.v5i2.29387>.
- ita rosita. “Peran Perempuan Sebagai Pendidik Perspektif M. Quraish Shihab.” *Braz Dent J.* 33, no. 1 (2022): 1–12.
- Kumari, Fatrawati. “Kesetaraan Gender Dalam Agama-Agama: Analisis Filsafat Taoisme-Islam Sachiko Murata.” *Muadalah* 10, no. 2 (2022): 65. <https://doi.org/10.18592/muadalah.v10i2.7471>.
- Purwanto, Edi. “Privatisasi Ruang Publik Dari Civic Centre Menjadi Central Business District (Belajar Dari Kasus Kawasan Simpang

Lima Semarang).” *Jurnal Tataloka* 16, no. 3 (2014): 153.
<https://doi.org/10.14710/tataloka.16.3.153-167>.

Rahminawati, Nan. “ISU KESETARAAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (BIAS GENDER) Nan Rahminawati.” *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 17, no. 3 (2001): 272–83.

Sholeh, Ismail. *Pandangan Walubi Terhadap Konflik Rohingya Di Myanmar*, 2018.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&url=http://repository.ui.njkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40481/1/ISMAIL%2520S%20HOLEH-FUF.pdf&ved=2ahUKEwjlrTYte7nAhVo63MBHSA0DHkQFjAAegQIAxAB&usq=AOvVaw3cvmvLi_R0IP936HsXuTfn.

Syahputra, Heru. “Posisi Agama Dalam Perbincangan Gender.” *Jurnal Filsafat Dan Teologi Islam* 11, no. 1 (2020): 118–34.

Tanoto, Wahyu. “Pluralisme Dalam Perspektif Walubi.” *Jurnal Religi* VIII, no. 1 (2012): 104–18.

WIRAWAN, PROF. DR. I.B. *TEORI-TEORI SOSIAL DALAM TIGA PARADIGMA*. Edited by KENCANA PRENADA MEDIA GROUP. 1st ed. Jakarta, 2012.

Website

khairiah, Agama Buddha, [https://samaggi-phala.or.id/naskah-dhamma/bhikkhu-dan-kegiatan-politik/\(diakses](https://samaggi-phala.or.id/naskah-dhamma/bhikkhu-dan-kegiatan-politik/(diakses) pada 30 April 2023)

Kiki Muhammad Hakiki, Kesetaraan Gender Orang Pedalaman: Mengungkap Kearifan Lokal Etika Perkawinan Orang Baduy, dalam buku *Filsafat, Etika, dan Kearifan Lokal Untuk Konstruksi Mora* Kebangsaan, <https://repository.globethics.net/bitstream/handle/20.500.12424/207644/focus77.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (diakses 19 september 2023)

Sholeh, Ismail. *Pandangan Walubi Terhadap Konflik Rohingya Di Myanmar*, 2018.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&url=http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40481/1/ISMAIL%2520SHOLEH-FUF.pdf&ved=2ahUKEwjlrTYte7nAhVo63MBHSA0DHkQFjAAegQIAxAB&usq=AOvVaw3cvmvLi_R0IP936HsXuTfn.
(diakses 22 Januari 2022)

Anriana Venny, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): persoalan privat yang jadi persoalan publik”
<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/647-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt-persoalan-privat-yang-jadi-persoalan-publik.html>. di akses pada tanggal 29 maret 2022.

Referensi Skripsi

Dewi, Metta Puspita. “Peran Dan Tantangan Penyuluh Agama Buddha Di Desa Kalimanggis Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung Dalam Mengendalikan Ingroup Favoritism.” *Agama Buddha Dan Ilmu Pengetahuan*, 2019

Dirman Isya Saputra, “Strategi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Di Bandar Lampung” (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018)

Ita Rosita, “Peran Perempuan Sebagai Pendidik Perspektif M. Quraish Shihab” (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2017).

Muliyani Sofiana, “Peran Perempuan dalam Agama Buddha” (Skripsi UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh, 2019).

Marantika, “Peran Wanita Dalam Ruang Publik Perspektif Islam dan

Kristen” (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2017)

Referensi Wawancara

Wawancara Ibu Hayesti Maulida, Seketaris Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga pada tanggal 5 Juli 2023

Wawancara Ibu Kiki Fadilah, Anggota Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga pada tanggal 5 Juli 2023

Wawancara Bapak Andi Lie Wirawan, Ketua Walubi pada tanggal 27 Juni 2023

Wawancara Ibu Lusi Cadrawati, Ketua Wanita Buddha Indonesia 16 Maret 2022

Wawancara Ibu Hellen, Anggota Wanita Buddha Indonesia 25 Maret 2022